

BAB I

A. Alasan Pemilihan Judul

Ide awal topik penelitian ini berangkat dari besarnya minat penulis terhadap kajian mengenai fenomenaperkembangan ekonomi Indonesia, saat ini perekonomian Indonesia melalui skala pemeringkatan pada tahun 2011, pertumbuhan ekonomi Indonesia berada pada posisi ketiga dunia setelah Cina dan India, posisi perkembangan perekonomian Indonesia juga sedikit banyak ditopang oleh kerjasama dengan Negara lain, baik kerjasama maupun perjanjian perdagangan Internasional, maka sangat menarik untuk dibahas permasalahan ini, karena seperti yang kita ketahui bahwa Indonesia pada dasarnya memiliki perjanjian tentang perdagangan Internasional, baik bilateral maupun regional, mengingat hal tersebut, maka menjadi pertanyaan yang besar bagi penulis ketika pada faktanya Indonesia menolak bergabung dalam *Trans-Pacific Partnership* (TPP). Dimana TPP juga merupakan salah satu bentuk perjanjian Perdagangan Internasioanal, Apa lagi jika kita perhatikan pada pokok permasalahan tersebut, dimana Indonesia sudah sedikit lebih berani untuk menentukan sikap dengan "Menolak" ajakan – ajakan dari luar! Sehingga penulis tertarik untuk menemukan point utama yang menjadi alasan – alasan kuat Indonesia untuk menolak bergabung dalam TPP.

Selain itu permasalahan yang akan dibahas dalam skripsi ini merupakan permasalahan yang baru, dimana belum ada artikel ataupun penelitian khusus yang

mengangkat permasalahan ini, hal ini disebabkan bahwa pengumuman ajakan bergabung dalam TPP masih sangat baru, yaitu di tengah-tengah Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) ke-19 *Asia Pacific Economic Cooperation* (APEC) di Honolulu, Kepulauan Hawaii.¹ dan saat ini masih dalam proses pemantapan kerangka kerja tersebut, sehingga penulis yakin ini merupakan suatu yang masih sangat hangat, penulis merasa yakin bahwa dari hasil penelitian akan banyak memberikan manfaat bagi kita semua, khususnya bagi dunia pendidikan di tingkat perguruan tinggi menyangkut permasalahan – permasalahan perdagangan internasional dalam Hubungan Internasional.

Karena alasan tersebutlah penulis tertarik meneliti lebih dalam sehingga menjadi sebuah tulisan ilmiah yang bisa dipertanggungjawabkan dengan mengangkat judul “Alasan yang dibalik penolakan Indonesia bergabung dalam *Trans-Pacific partnership*”.

B. Latar Belakang Masalah

Perdagangan internasional adalah proses tukar menukar barang dan jasa antar negara bangsa. Sebab-sebab terjadinya perdagangan internasional, yaitu: Perbedaan sumber daya alam (SDA), Perbedaan ilmu pengetahuan dan

¹Kerjasama Transpasifik dan Misi AS, dalam <http://www.jakarta45.wordpress.com/doc/25820743/Kerjasama-Transpasifik-dan-Misi>

.teknologi (IPTEK), Perbedaan kebudayaan, Mencari keuntungan, Untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri.²

Dari jumlah anggota, Perdagangan Internasional bisa dibagi dalam beberapa bentuk, yaitu Perdagangan Bilateral, Regional dan Multilateral. Perdagangan Bilateral adalah kerjasama perdagangan yang dilakukan oleh dua Negara, Perdagangan regional adalah perjanjian dari dua atau lebih negara. kerjasama perdagangan regional dapat diartikan menjadi dua konsep utama yakni regional cooperation (kerjasama regional) dan regional integration (penyatuan regional). Yang pertama dapat dipahami sebagai kebijakan bersama yang diambil oleh sekelompok negara –yang biasanya terletak dalam satu kawasan- untuk mencapai tingkat kemakmuran yang lebih besar daripada upaya yang dilakukan masing-masing negara secara independen. Dan kedua yakni penyatuan regional yang berupa peleburan secara de facto beberapa negara dalam satu kawasan geografis. Perdagangan Multilateral adalah Kerjasama Perdagangan yang bisa diikuti oleh setiap Negara, tanpa harus melihat dari kawasan mana Negara tersebut berada, namun kelemahan dari Perdagangan Multilateral ini begitu banyak kepentingan setiap Negara sehingga lebih susah untuk menentukan kebijakan, sehingga Sejak kegagalan *World Trade*

² Pengertian Perdagangan Internasional, dalam 15. <http://www.karyatulisilmiah.com/artikel/3771/Pengertian-Perdagangan-Internasional>. diakses 15 Januari 2012

Organization di Seattle 1999, telah terjadi pergeseran arah negosiasi kerjasama perdagangan dari multilateral ke regional dan bilateral.³

Salah satu bentuk kerjasama regional tersebut adalah *Trans-Pacific Partnership* (TPP). TPP merupakan kerangka kerja yang mencakup Negara – Negara yang berada pada wilayah sekitar Samudera Pacific. Pengagas TPP ini adalah Brunei Darussalam, Chile, Selandia Baru dan Singapura. TPP dikenal juga sebagai *Trans-Pacific Economic Strategic Partnership Agreement* adalah perjanjian perdagangan bebas multilateral yang bertujuan meliberalisasi ekonomi di kawasan Asia Pasifik.

Ide ini semula digagas oleh 3 negara anggota APEC (Chile, Singapura dan Selandia Baru) saat pertemuan Pimpinan Negara-negara APEC di Los Cabos Mexico pada tahun 2002, yang kemudian dikenal sebagai *Pacific Three Closer Economic Partnership* (P3-CEP). Kemudian pada tahun 2005 Brunei sepenuhnya bergabung sehingga menjadi Pacific-4. Pada tahun 2006, 6 negara lagi ikut bergabung, yaitu Australia, Malaysia, Peru, Jepang, Amerika Serikat (AS) dan Vietnam⁴. Meskipun negara-negara yang bergabung dalam TPP tersebut notabene adalah negara-negara anggota APEC, namun TPP bukanlah inisiatif dari APEC. Justru TPP adalah bentuk kritik atas APEC yang dianggap terlalu lambat proses liberalisasinya.

³Ispryahadi, Heri. & Sibarani, Mutiara. 2007. "Kerjasama Perdagangan Bilateral" dalam Sjamsul, Arifin. et al. *Kerjasama Perdagangan Internasional : Peluang dan Tantangan Bagi Indonesia*. Jakarta : Elex Media Komputindo. Ch 5.

⁴*Indonesia Tegas Menolak Kerjasama Trans Pasifik*, dalam 4. <http://www.kabarbengkulu.com/home/Indonesia-Tegas-Menolak-Kerjasama-Trans-Pasifik/9878>. diakses 9 Agustus 2012

Bagaimana dengan sikap Indonesia? Pemerintah Indonesia menegaskan menolak ajakan Presiden AS Barack Obama untuk masuk ke dalam persekutuan perdagangan bebas baru bernama TPP. Hal ini disampaikan oleh Menteri Perdagangan RI Gita Wirjawan di sela KTT APEC di Hotel Trump Waikiki, Honolulu, Hawaii, AS

Sejauh ini baru sembilan negara anggota APEC yang bersedia bergabung dalam rencana kerja sama TPP tersebut, yakni Singapura, Brunei, Malaysia, Selandia Baru, Amerika, Australia, Chile, Peru, dan Vietnam. Adapun 12 negara lainnya belum bergabung yaitu Indonesia, Kanada, Cina, Hong Kong, Jepang, Korea Selatan, Meksiko, Papua Nugini, Filipina, Rusia, Taiwan, dan Thailand.

C. Rumusan Permasalahan

Berdasarkan uraian di atas maka dapat di rumuskan permasalahan sebagai berikut:

Mengapa Indonesia menolak untuk bergabung dalam *Trans-Pacific Partnership*

D. Kerangka Teori

Kebijakan pemerintah Indonesia untuk menolak bergabung dalam TPP tidak dapat dilepaskan dari kekuasaan pemerintah, pengaruh pasar internasional terhadap ekonomi domestik, dan motivasi-motivasi para elit dalam pengambil keputusan untuk mendapatkan keuntungan. Kajian terhadap Kebijakan pemerintah Indonesia untuk menolak bergabung dalam TPP.

1. Teori Pengambilan Keputusan

Graham Allison mengajukan tiga model teori pengambilan keputusan yang dapat digunakan untuk menganalisis kebijakan politik luar negeri suatu Negara.⁵ yaitu:

Pertama, *The Rational Actor Model*. Menurut model ini, kebijakan di keluarkan berdasarkan logika atau rasionalitas untuk mencapai tujuan atau kepentingan pemerintah. Kebijakan atau tindakan-tindakan selalu dikaitkan dengan sejumlah keuntungan-keuntungan sehingga setiap keputusan yang di ambil adalah hasil dari alternative keputusan. Aktor pengambil keputusan biasanya terpanggil untuk mengkaitkan keuntungan-keuntungan tersebut dengan dengan upaya mencapai kepentingan-kepentingan nasional. Para aktor yang berperan dalam Kebijakan pemerintah Indonesia untuk menolak bergabung dalam TPP menjadikan kepentingan Indonesia seperti melindungi produk dalam negeri atas gempuran produk luar negeri dan Perlindungan Industri dalam negeri sebagai alasan untuk mengambil keputusan.

⁵James E. Dougherty and Robert L. Pflatzgraff, Jr, *Contending Theories of International Relations. A Comprehensive Survey*. Fourth Edition. New York : Longman, 1996, hal.465

Kedua, *An Organizational Process Model*, menurut model ini, kebijakan suatu Negara merupakan wujud dari perilaku pemerintah, sedangkan pemerintah sendiri merupakan hasil dari interaksi organisasi-organisasi besar di Negara bersangkutan. Dari sekian banyak organisasi tersebut hanya sebagian kecil saja yang berinteraksi dengan kepala Negara atau pemimpin Negara, oleh karena itu analisa juga perlu melihat organisasi apa saja yang menjalin interaksi dengan pemerintah dalam proses pengambilan keputusan.

Ketiga, *Bureaucratic Politics Model*. Menurut model ini, pengambilan keputusan oleh suatu Negara terjadi melalui proses persaingan politik di antara unit-unit pengambilan kebijakan. Politik luar negeri suatu Negara merupakan hasil dari tarik menarik bergaining antara berbagai komponen Pemerintah sehingga politik luar negerinya tidak selalu konsisten dengan Negara yang bersangkutan seperti terdapat dalam masterplannya.

Pengambilan keputusan tidak dapat disederhanakan hanya pada masalah rasionalitas para aktor pengambil keputusan karena mereka juga terikat pada aturan perundang-undangan atau prosedur birokrasi di negaranya. Sebaliknya, pengambilan keputusan oleh birokrasi tidak hanya dipengaruhi oleh perilaku birokrasi seperti tampak pada rutinitas birokrasi atau organisasi pemerintahan yang ada di Negara bersangkutan, tetapi juga di tentukan oleh para pemimpin pemerintahan sebagai aktor-aktor pengambil keputusan. Besarnya peran pemimpin sebagai aktor pengambil

keputusan menunjukkan bahwa suatu proses pengambilan keputusan juga harus dilihat proses politik yang terjadi dalam negeri Negara bersangkutan.⁶

Pengambilan keputusan dalam Kebijakan pemerintah Indonesia untuk menolak bergabung dalam TPP lebih mengarah pada model pertama, yaitu *The Rational Actor Model*, dalam hal ini banyak menekankan pada pertimbangan kepentingan Negara yang akan di dapat dari bergabungnya Indonesia dalam TPP. Pemerintah menghitung berapa keuntungan dan berapa kerugian yang akan di dapat Indonesia, karena bagaimanapun kerjasama ini haruslah memberikan keuntungan bagi Indonesia.

Jumlah produk luar negeri yang masuk ke Indonesia yang sangat banyak merupakan wujud bahwa relasi perdagangan bebas antara Indonesia dengan Negara lain belum terlalu menguntungkan bagi Indonesia, hal ini telah menjadi pemahaman Para Elit bahwa keterbukaan pasar bebas akan mengganggu proses produksi industri dalam negeri, dan berarti belum mengarah pada hal positif bagi perkembangan ekonomi dalam negeri Indonesia.

Dengan posisi indutri yang belum kuat, produk yang belum mampu bersaing dengan produk luar baik dari segi mutu maupun harga, maka Indonesia bisa di pastikan hanya menjadi Negara tujuan menjual produk-produk dari Negara lain, mengingat pasar Indonesia yang sangat luas, serta penduduk yang konsumtif, maka

⁶James E. Dougherty and Robert L. Pflatzgraff, Jr, *Contending Theories of International Relations. A Comprehensive Survey*, hal 465

ini akan memperburuk keadaan industri di Indonesia, bahkan bisa mengancam keberlangsungan industri dalam negeri. Saat ini saja pemberlakuan ACFTA telah membuat industri Indonesia keteteran, apa lagi jika Indonesia bergabung dalam TPP. Ini merupakan hitungan-hitungan yang di lakukan Indonesia dalam siap atau tidaknya Indonesia dalam TPP.

Teori pengambilan keputusan dalam penelitian ini digunakan untuk menganalisis keputusan-keputusan yang diambil pemerintah Indonesia untuk kepentingan Nasional Indonesia seperti melindungi produk dalam negeri atas gempuran produk luar negeri dan Perlindungan Industri dalam negeri serta memaksimalkan pasar domestik.

2. Teori Perdagangan Internasional

Perdagangan Internasional masuk dalam ranah ekonomi politik yang mempelajari hubungan timbal balik antara tindakan-tindakan ekonomi dengan kekuasaan (power) pemerintah atau negara⁷. Ada 3 isu utama yang menurut Robert Gilpin selalu dipelajari dalam ekonomi politik internasional, yaitu 1) isu bahwa terdapat hubungan antara perubah ekonomi dan perubahan politik, 2) isu mengenai penyebab atau hal-hal yang mempengaruhi perkembangan pasar, dan 3) isu adanya pengaruh signifikan dari ekonomi pasar dunia terhadap ekonomi domestik⁸

⁷ Vernon Alton, *Elementary Political International Analysis*, Bandung, 1995, hal 2

Teori perdagangan Internasional digunakan karena harus disesuaikan dengan perjanjian yang telah dibentuk oleh negara – negara yang masuk dalam Perjanjian perdagangan Internasional, pemberlakuan dan pencabutan kuota adalah hasil dari kesepakatan penerapan perdagangan bebas, pemerintah Indonesia mau tidak mau harus mengikuti alur yang telah ditetapkan, penerapan peraturan perdagangan tersebut berdampak langsung terhadap kemampuan industri dalam negeri, dimana menjadi semakin sulit menghadapi persaingan dengan negara lain.

Perdagangan Internasional merupakan perkembangan lebih lanjut keberhasilan Industrialisasi yang dirintis melalui berbagai penemuan mesin – mesin industri sejak abad pertengahan, Industrialisasi ..menciptakan mata rantai perekonomian yang membentuk pola kehidupan ekonomi dari produksi, distribusi,, dan konsumsi. Industrialisasi mampu mempercepat proses produksi sehingga membutuhkan lebih banyak lagi bahan mentah dan bahan baku. Produksi yang berlimpah dan kebutuhan bahan mentah telah mendorong Negara-negara untuk menjalin kerjasama dengan Negara lain, misalnya pasar bebas, baik bermaksud menjual hasil-hasil produksi maupun mendapatkan bahan mentah atau faktor produksi lainnya.

Perdagangan internasional terkait erat dengan liberalisasi perdagangan yang tidak menginginkan adanya hambatan-hambatan oleh Negara dalam perdagangan internasional, konsep perdagangan internasional dapat dipahami dari adanya hubungan perdagangan antara satu Negara dengan Negara – Negara lainnya yang

tercermin pada kegiatan ekspor dan impor. Ekspor dapat diartikan sebagai kegiatan yang menyangkut produksi barang dan jasa yang diproduksi di suatu Negara untuk dikonsumsi diluar batas Negara tersebut.⁹

Perdagangan internasional terjadi karena adanya pembagian kerja Internasional yang didasarkan pada keunggulan dari suatu Negara dalam menghasilkan suatu komoditas daripada Negara-negara lain, sementara negara bersangkutan merasa lebih menguntungkan apabila hanya memproduksi barang tertentu dan merasa lebih menguntungkan apabila mendatangkan produk luar negeri untuk memenuhi kebutuhan Negara yang bersangkutan. Dalam konteks global, perdagangan internasional arus menyesuaikan diri dengan globalisasi, secara makro teori globalisasi dapat diartikan sebuah teori yang didasarkan atas asumsi perdagangan bebas/pasar bebas, tanpa adanya hambatan baik tarif maupun non tarif.¹⁰ Namun secara mikro, globalisasi ekonomi dapat diartikan sebagai sebuah inisiatif bisnis yang didasarkan atas kepercayaan bahwa dunia telah menjadi sedemikian homogen, seiring dengan semakin mengaburnya perbedaan nyata antar pasar domestik.

Teori Perdagangan Internasional dalam penelitian ini digunakan untuk menganalisis tindakan yang dilakukan pemerintah Indonesia dalam

⁹ Triyoso, Bambang, "Model Ekspor Non Migas Indonesia untuk proyeksi jangka, pendek" ekonomi dan keuangan Indonesia, 1994, 32(2);210

¹⁰ Hamdy, Hady, 2001, ekonomi Internasional – teori dan kebijakan perdagangan internasional, Buku1, Edisi revisi Jakarta: Ghalia Indonesia, hal 48

mempertimbangkan alasan yang menjadi keengganan Indonesia bergabung dalam TPP.

E. Hipotesis

Berdasarkan kerangka teori di atas, diajukan hipotesis bahwa : Indonesia menolak bergabung dalam TPP berdasarkan perhitungan asas manfaat yang akan di dapatkan Indonesia.

F. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penulisan skripsi ini adalah :

1. Mendeskripsikan kendala yang di alami Indonesia dalam beberapa perjanjian perdagangan bebas yang sudah ada, serta kesiapan Indonesia menghadapi perdagangan bebas.
2. Menjelaskan kendala yang dihadapi Industri Indonesia dalam melakukan produksi serta mengeksport produksi ke luar negeri pada bidang sarana dan prasarana produksi.
3. Mendeskripsikan kekuatan pasar domestik dan kontribusi pasar domestik terhadap kemainan ekonomi Indonesia

G. Metode Penelitian

1. Ruang Lingkup Penelitian

Untuk menjaga fokus pada penelitian, yang bermaksud agar tidak terlalu luas dan melenceng dari kajian masalah serta judul yang ada dan agar mudah dimengerti, maka penulis membatasi penelitian pada dampak yang diterima Indonesia pasca pemberlakuan ACFTA, masalah yang di hadapi industri dalam negeri, serta pemaparan tentang kondisi pasar domestik.

2. Metode Pengumpulan Data

Dalam melakukan penelitian ini metode yang digunakan adalah berupa studi kepustakaan, dengan mengumpulkan data-data skunder yang telah ada, baik melalui buku-buku, jurnal-jurnal, artikel, majalah, surat kabar, serta situs internet.

3. Metode Analisis Data

Penelitian ini dianalisis dengan Teknik Analisis Deskriptif, yang berarti data dan fakta yang di peroleh dan berdasarkan teori akan dianalisis secara sistematis, sehingga dapat memperlihatkan hubungan atau korelasi antara fakta yang satu dengan fakta yang lain.

H. Sistematika Penulisan

Penulisan studi Hubungan Internasional ini disusun secara sistematis mulai dari bab pendahuluan, isi dan penutup dengan perincian sebagai berikut :

- Bab I Merupakan Bab pendahuluan yang berisikan latar belakang masalah, perumusan masalah, landasan teori yang digunakan untuk menjelaskan dan menjawab permasalahan penelitian, hipotesis, dan sistematika penulisan.
- Bab II Mendeskripsikan apa yang dimaksud dengan kerjasama TPP, awal mula peng gagasan TPP, serta hal-hal yang berkaitan dengan TPP.
- Bab III Mendeskripsikan peran serta Indonesia dalam beberapa perjanjian perdagangan bebas yang telah dibentuk, kondisi industry dalam negeri dari segi infrastruktur, serta mendiskripsikan kekuatan pasar domestik.
- Bab IV Mendeskripsikan alasan-alasan yang menjadi pertimbangan Indonesia untuk menolak bergabung dalam TPP.
- Bab V Pada bagian ini akan menjadi kesimpulan pada pembahasan yang telah dijabarkan pada bab-bab sebelumnya, penulis bermaksud membentuk korelasi antara antar bab tersebut.